



**BADAN KEPEGAWAIAN  
DAERAH KABUPATEN  
BATANG**

**RANCANGAN AKHIR  
RENCANA KERJA  
TAHUN 2024**

- **HASIL EVALUASI RENJA  
PERANGKAT (RENJA PD) TAHUN  
LALU**
- **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM  
DAN KEGIATAN**
- **RENCANA KERJA DAN  
PENDANAAN PERANGKAT  
DAERAH**

## KATA PENGANTAR

Atas limpahan rahmat dan hidayah-NYA semata kepada kita semua, sehingga Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 dapat terselesaikan dengan baik. Tujuan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 adalah untuk menggambarkan secara menyeluruh tentang Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang yang meliputi Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD serta Tujuan dan Sasaran Program Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan dari pembaca. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan Renja ini.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 ini nantinya dapat memberikan gambaran dan kontribusi terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2024.

Batang, 31 Juli 2023  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
KABUPATEN BATANG



SUPARDI, SH, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19630706 198503 1 015

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	6
1.3. Maksud dan Tujuan .....	9
1.4. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT (RENJA PD) TAHUN LALU</b>	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Badan Kepegawaian Daerah Kab. Batang Tahun 2022 dan Capaian Renstra Daerah sampai dengan Tahun 2022.....	14
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	30
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang.....	35
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	41
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	51
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....	53
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah (PD) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang.....	63
3.3 Program dan Kegiatan BKD Kabupaten Batang Tahun 2024.....	70
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH. ....</b>	
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>87</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan agar perencanaan pembangunan daerah senantiasa konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selaras dengan hal tersebut, perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 mengacu pada perencanaan nasional dan provinsi sehingga diharapkan ada kesinambungan program-program pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengatur bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi perencanaan jangka panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah). Penyusunan dokumen perencanaan pada jangka menengah dan tahunan, tidak hanya menjadi kewajiban Pemerintah Daerah saja, tetapi juga kewajiban Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dokumen perencanaan Pembangunan Lima Tahunan pada OPD disusun dalam bentuk Rencana Strategis (RENSTRA) yang mempedomani RPJMD, sedangkan dokumen perencanaan pembangunan tahunan OPD

disebut sebagai Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) yang mempedomani RKPD.

Tahun 2024 ini, Pemerintah Kabupaten Batang dipimpin oleh Penjabat Bupati Batang sejak bulan Mei 2023, dimana sebagai pedoman Penjabat Bupati untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah tahun 2023-2026 maka telah disusun Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 dan telah ditetapkan dalam PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2023-2026. Hal ini sebagai pelaksanaan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2021 yaitu bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah karena masa jabatan berakhir pada tahun 2022 atau 2023 maka dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD) yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD diinstruksikan khususnya kepada Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir tahun 2022, agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026.

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 di atas, maka disusunlah Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan menengah perangkat daerah yang disusun sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja (Renja) periode 2023-2026.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah dalam bidang Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia, Rencana Kerja (Renja)

Tahun 2024 merupakan tahun kedua penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023-2026 dan selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 khususnya dalam rangka mendukung terwujudnya salah satu Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Batang yaitu :

Tujuan : “Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel”

Sasaran : “ Meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah” dan “Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang cerdas, cepat dan responsif (agile governance)”.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang membutuhkan partisipasi masyarakat.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 dalam Ketentuan Umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun berupa dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Tata cara penyusunan Renja sebagaimana Permendagri 86/2017 adalah sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan Renja (pasal 125) , meliputi :
  - a. penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
  - b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
  - c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat Daerah; dan
  - d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja PD (Pasal 126-130), meliputi :

Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja pada minggu pertama bulan Desember yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.
3. Penyusunan Rancangan Renja PD (Pasal 131-135) :
  - a. Penyusunan Rancangan Renja PD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja PD setelah dilakukan review oleh Tim RKPD
  - b. Rancangan Renja PD dibahas dan disempurnakan

dalam forum PD/lintas PD

- c. Rancangan Renja PD disampaikan kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD. Rancangan Renja PD disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Maret.

4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Pasal 136-137)

Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA. Forum tersebut dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.

5. Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah (Pasal 138)

Perumusan rancangan akhir Renja PD merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja PD menjadi rancangan akhir Renja

6. Penetapan Renja Perangkat Daerah (Pasal 139-143)

- a. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi
- b. Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan
- c. BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada



Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

- d. Penetapan Renja Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.
- e. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Berdasarkan tata cara penyusunan Renja di atas , dapat disimpulkan bahwa Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 yang disusun ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 dan selanjutnya Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD) akan menjadi acuan dalam menentukan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), dan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan RENJA Perangkat Daerah (PD) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 6 Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- j. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 tahun 2007 tentang Tata Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD) kabupaten Batang Tahun 2005-2025 (Lembaran daerah Kabupaten Batang tahun 2007 Nomor 13 seri E nomor7);

- k. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2021 Nomor 2);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang Tahun 2019-2039 (Lembaran daerah Kabupaten Batang tahun2019 Nomor 13);
- m. Peraturan Bupati Batang Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Batang tahun 2021 Nomor 115);
- n. Peraturan Bupati Batang Batang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun

2022 Nomor 12);

- o. Peraturan Bupati Batang Batang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 Nomor 16);
- p. Peraturan Bupati Batang Batang Nomor 36 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023 Nomor 36).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1. Maksud**

1. Terciptanya sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan, khususnya yang menjadi tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang;
2. Memberikan pedoman, gambaran, dan arah pembangunan bidang kepegawaian jangka pendek (satu tahun) yaitu untuk tahun 2024.

#### **1.3.2. Tujuan**

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 disusun dengan tujuan :

1. Memberikan informasi yang komprehensif tentang rencana program, dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024;
2. Menyediakan dokumen acuan yang pasti bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024;

3. Menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

##### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini memberi gambaran umum tentang penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024

##### **1.1. Latar Belakang**

Bagian ini mengemukakan pengertian ringkas Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024, proses penyusunannya, dan keterkaitannya dengan dokumen RKPD Kabupaten Batang, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

##### **1.2. Landasan Hukum**

Bagian ini memuat peraturan-peraturan yang mendasari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024.

##### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Bagian ini memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Badan Kepegawaian

Daerah Kabupaten Batang.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Bagian ini menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang serta susunan garis besar isi dokumen.

### Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022.

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Badan Kepegawaian Daerah Kab. Batang Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2022.

Bagian ini menguraikan review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 dan realisasi Renstra Perangkat Daerah (PD) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang mengacu pada hasil Laporan Kinerja Tahunan.

#### 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menguraikan capaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan.

#### 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan

Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

3. Dampaknya terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Daerah

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.

5. Formulasi dan isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

#### 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Batang.

Bagian ini menguraikan proses pembandingan rancangan awal dengan analisis kebutuhan, dan temuan-temuan yang ada setelah proses tersebut.

#### 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, Asosiasi- asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota.

### Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat

Daerah Bab ini menguraikan :

### 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Bagian ini menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang.

Bagian ini merumuskan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang.

### 3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

## Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan tentang rencana kerja dan pendanaan sesuai yang tertuang dalam usulan Renstra 2023-2026.

## Bab V Penutup

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.



## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Daerah Kab. Batang Tahun 2022 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2022**

Evaluasi Kinerja dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang guna mengidentifikasi apakah pelaksanaan pembangunan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan sehingga dapat diketahui efektivitas pelaksanaan proses perencanaan pembangunan dan kendala-kendala dalam pelaksanaan pembangunan. Hasil evaluasi tersebut sebagai bahan pertimbangan kebijakan di tahun berikutnya.

Secara keseluruhan alokasi anggaran yang dikelola Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang tahun 2022 sebesar Rp. 7.797.985.337,- terealisasi sebesar Rp 6.941.781.919,- atau 89,02%. Realisasi anggaran yang tidak mencapai seratus persen tersebut disebabkan oleh faktor efisiensi penggunaan anggaran tanpa mengurangi efektifitas pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan tahun 2021, dimana alokasi anggarannya Rp. 9.348.806.716,- dan terealisasi sebesar Rp 7.386.665.686 ,- atau 79,03%, maka realisasi anggaran tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 6,02% , hal ini dikarenakan pada tahun 2022 terdapat beberapa pelaksanaan kegiatan yang belum terealisasi dikarenakan mengikuti kebijakan dari Pemerintah Pusat.

Realisasi keuangan dan capaian kinerja fisik kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**TABEL 2.1.a.**  
**Rekapitulasi Realisasi Keuangan dan Capaian**  
**Kinerja Fisik Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten**  
**Batang**  
**Tahun 2022**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		%	Kinerja Fisik		
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	Satuan
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>4.990.408.527</b>	<b>4.849.047.384</b>	<b>97,17</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	%
	<b>A. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>3.318.473.977</b>	<b>3.259.282.024</b>	<b>98,22</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	%
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.299.813.977	3.240.802.024	98,21	100	100	%
	2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18.660.000	18.480.000	99,04	12	12	dok
	<b>B. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.945.400</b>	<b>98,91</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	%
	1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000	4.945.400	98,91	7	7	dok
	<b>C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>180.008.450</b>	<b>173.774.550</b>	<b>96,54</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	ASN
	1. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	32.488.650	30.788.200	94,77	80	80	ASN

	2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	147.519.800	142.986.350	96,93	165	165	ASN
	<b>D. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>695.832.700</b>	<b>655.758.683</b>	<b>94,24</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	%
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.791.000	13.800.000	93,3	12	12	bulan
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	364.634.900	349.639.367	95,89	12	12	bulan
	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	91.420.000	85.920.000	93,98	12	12	bulan
	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.750.000	31.199.400	98,27	12	12	bulan
	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.000.000	7.080.000	78,67	100	100	%
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	184.236.800	168.119.916	91,25	12	12	bulan
	<b>E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>413.243.400</b>	<b>384.818.724</b>	<b>93,12</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	%
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.113.000	1.897.100	89,78	12	12	bulan
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	183.000.000	167.242.595	91,39	12	12	bulan
	3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	42.479.270	84,96	12	12	bulan
	4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	178.130.400	173.199.759	97,23	100	100	%

	<b>F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>377.850.000</b>	<b>370.468.003</b>	<b>98,05</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	%
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	184.800.000	177.895.003	96,26	23	23	kendaraan
	2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	193.050.000	192.573.000	99,75	1	1	gedung
<b>2</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>1.953.195.060</b>	<b>1.290.712.423</b>	<b>66,08</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	%
	<b>A. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>1.124.123.020</b>	<b>657.905.026</b>	<b>58,53</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	%
	1. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	16.862.000	10.958.300	64,99	1	1	dok
	2. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	794.356.030	365.083.050	45,96	910	906	formasi
	3. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	62.637.360	62.199.462	99,3	100	100	%
	4. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	176.267.790	152.996.540	86,8	100	100	%
	5. Pengelolaan Data Kepegawaian	73.999.840	66.667.674	90,09	100	100	%
	<b>B. Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>479.911.000</b>	<b>309.796.171</b>	<b>64,55</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	%
	1. Pengelolaan Mutasi ASN	16.620.000	16.460.050	<b>99,04</b>	100	100	%

	2. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	20.000.000	19.945.000	<b>99,73</b>	100	100	%
	3. Pengelolaan Promosi ASN	443.291.000	273.391.121	<b>61,67</b>	100	100	%
	<b>C. Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>146.555.840</b>	<b>131.842.100</b>	<b>89,96</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	%
	1. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	96.555.840	85.471.600	88,52	135	135	%
	2. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	50.000.000	46.370.500	92,74	220	220	%
	<b>D. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>	<b>202.605.200</b>	<b>191.169.126</b>	<b>94,36</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	%
	1. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	18.000.000	14.961.300	83,12	159	159	ASN
	2. Pembinaan Disiplin ASN	120.430.700	114.474.926	95,05	5696	5696	ASN
	3. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	64.174.500	61.732.900	96,2	10	10	kasus
<b>3</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>	<b>854.381.750</b>	<b>802.021.312</b>	<b>93,87</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	%
	<b>A. Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>149.941.750</b>	<b>106.185.819</b>	<b>70,82</b>	<b>41</b>	<b>41</b>	ASN
	1. Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	36.500.000	27.659.600	75,78	<b>1</b>	1	

	2. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	113.441.750	78.526.219	69,22	41	41	ASN
	<b>B. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>704.440.000</b>	<b>695.835.493</b>	<b>98,78</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>%</b>
	1. Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	704.440.000	695.835.493	98,78	141	141	ASN
	<b>JUMLAH</b>	<b>7.797.985.337</b>	<b>6.941.781.119</b>	<b>89,02</b>			

Dari data yang tersaji dalam Tabel Rekapitulasi Realisasi Keuangan dan Capaian Kinerja Fisik Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang di atas tampak bahwa terdapat 3 Kegiatan yang realisasinya kurang dari 80%, hal ini dapat kami uraikan sebagai berikut :

#### **1. Kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian**

Pada kegiatan ini target yang tercapai hanya 58,63%, disebabkan terdapat Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS yang realisasi pelaksanaan Seleksi Pengadaan CPNS dan PPPK tingkat Kab/Kota mengikuti regulasi dan kebijakan Pemerintah Pusat, yang mana untuk tahun 2022 Tahapan yang sudah terlaksana sesuai jadwal Pemerintah Pusat adalah Seleksi Administrasi, sehingga terdapat efisiensi pada pos belanja Fasilitasi CAT maupun belanja Pemberkasan Pengajuan NIPPPK.

Implikasi terhadap target Renstra untuk Program Kepegawaian Daerah tidak berpengaruh besar karena Indikator Program ini adalah Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang selesai tepat waktu, dimana secara global pelayanan administrasi kepegawaian terlaksana tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan.

#### **2. Kegiatan mutasi dan promosi ASN**

Pada kegiatan ini target yang tercapai hanya 64,55% disebabkan Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN belum terlaksana Evaluasi Jabatan/Seleksi/Rotasi/Mutasi hal ini berkaitan dengan kewenangan Pj Bupati Batang sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 132 A dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.100-2/99 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Penjelasan atas Kewenangan Penjabat Kepala Daerah di Bidang Kepegawaian, bahwa untuk dapat melakukan pengisian pejabat dan mutasi pegawai harus mendapatkan ijin secara



tertulis dari Kementerian Dalam Negeri terlebih dahulu sehingga memerlukan waktu dalam proses administrasinya, selanjutnya dalam hal guna menjamin kelancaran pelaksanaan tugas di OPD, diterbitkan Surat Perintah Pelaksana Tugas pada beberapa jabatan kosong.

Implikasi terhadap target Renstra untuk Program Kepegawaian Daerah tidak berpengaruh besar karena Indikator Program ini adalah Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang selesai tepat waktu, dimana secara global pelayanan administrasi kepegawaian terlaksana tepat waktu sesuai jadwal yang ditentukan.

### **3. Kegiatan Pengembangan Kompetensi teknis**

Pada kegiatan ini target yang tercapai hanya 70,82% disebabkan pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum terdapat Beberapa Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Teknis yang diselenggarakan secara Online/Daring sehingga terefisiensi dalam belanja kontribusinya. Namun demikian hal ini tidak mempengaruhi capaian dari target jumlah ASN yang terkirim diklat teknis, sehingga capaian kinerjanya tercapai 100%.

Implikasi terhadap target Renstra untuk Program Kepegawaian Daerah tidak berpengaruh besar karena Indikator Program ini adalah Persentase indikator program prioritas sub koordinator diklat yang mencapai target dimana dari 3 Sub Kegiatan yang ada target kinerja tercapai 100%

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang tahun 2022 dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang dapat dilihat pada **tabel 2.1.b. (T-C 29)** di bawah ini :

TABEL 2.1.b T-C.29.

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Daerah dan  
Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2022**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2) Tahun 2022						Target program dan kegiatan ( Renja Perangkat Daerah tahun n- 1) tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun berjalan (tahun 2023)				
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah th 2022 (n-2)		Tingka t Realisa si (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d th 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1					2	3	4	5	6		7		8=(7/6)		9	10 = 5+7+9		11 = (10/4)		
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN															
5	3				KEPEGAWAIAN															
5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase capaian kinerja program BKD	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	%	100	%	100
5	3	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	28	dokumen	50	dokumen	7	dokumen	7	dokumen	100	7	dokumen	7	dokumen	25
5	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	28	dokumen	50	dokumen	7	dokumen	7	dokumen	100	7	dokumen	7	dokumen	25

						OPD yang tersusun														
5	3	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan keuangan yang disusun	48	laporan	60	laporan	12	laporan	12	laporan	100	12	laporan	12	laporan	25
5	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34	orang	34	orang	34	orang	34	orang	100	34	orang	34	orang	100
5	3	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48	dokumen	60	dokumen	12	dokumen	12	dokumen	100	12	dokumen	12	dokumen	25
5	3	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan pelaksanaan BinteK, Sosialisasi dan workshop	12	laporan	12	laporan	12	laporan	12	laporan	100	3	laporan	3	laporan	25
5	3	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	240	orang	391	orang	80	ASN	80	ASN	100	60	orang	60	orang	25
5	3	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	480	orang	425	orang	165	ASN	165	ASN	100	120	orang	120	orang	25
5	3	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat	48	laporan	60	laporan	12	laporan	12	laporan	100	12	laporan	12	laporan	25



5	3	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	48	laporan	60	laporan	12	laporan	12	laporan	100	12	laporan	12	laporan	25
5	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	laporan	60	laporan	12	laporan	12	laporan	100	12	laporan	12	laporan	25
5	3	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48	laporan	60	laporan	12	laporan	12	laporan	100	12	laporan	12	laporan	25
5	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48	laporan	60	laporan	100	laporan	100	laporan	100	12	laporan	12	laporan	25
5	3	1	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah</b>	48	bulan	<b>60</b>	bulan	12	bulan	12	bulan	100	12	bulan	12	bulan	25
5	3	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24	unit	23	unit	23	unit	23	unit	100	24	unit	24	unit	100
5	3	1	2.09	10	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Gedung	1	Gedung	1	gedung	1	gedung	100	1	Gedung	1	Gedung	100

5	3	2			<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang selesai tepat waktu</b>	100	%	<b>100</b>	%	<b>100</b>	%	<b>100</b>	%	100	100	%	100	%	100
5	3	2	2.01		<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>Jumlah laporan terlaksananya pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	48	lapor an	<b>60</b>	lapor an	12	laporan	12	lapor an	100	12	laporan	12	lapor an	25
5	3	2	2.01	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	4	doku m en	4	dok u men	1	dok	1	dok	100	1	dokum e n	1	doku m en	24,75
5	3	2	2.01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	4	doku m en	6	dok u men	1	dokum e n	1	dok u men	100	1	dokum e n	1	doku m en	24,75
5	3	2	2.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	48	doku m en	60	dok u men	12	dokum e n	12	dok u men	100	12	dokum e n	12	doku m en	25
5	3	2	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	48	doku m en	60	dok u men	12	dokum e n	12	dok u men	100	12	dokum e n	12	doku m en	25

5	3	2	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	48	dokumen	60	dokumen	12	dokumen	12	dokumen	100	12	dokumen	12	dokumen	25
5	3	2	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	<b>Jumlah laporan terprosesnya Mutasi, Kenaikan Pangkat dan Promosi ASN</b>	48	laporan	<b>60</b>	laporan	12	laporan	12	laporan	100	12	laporan	12	laporan	25
5	3	2	2.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan mutasi Jabatan Pelaksana (JFU & JFT) antar Daerah	8	dokumen	12	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	2	dokumen	2	dokumen	25
5	3	2	2.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	8	dokumen	12	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	2	dokumen	2	dokumen	25
5	3	2	2.02	3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	4	dokumen	6	dokumen	1	dokumen	1	dokumen	100	1	dokumen	1	dokumen	24,75
5	3	2	2.03		<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Pengembangan Kompetensi ASN dan Fasilitas Pengembangan Karier dalam Jabatan Fungsional</b>	48	laporan	<b>60</b>	laporan	12	laporan	12	laporan	100	12	laporan	12	laporan	25
5	3	2	2.03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	48	laporan	60	laporan	60	laporan	60	laporan	100	12	laporan	12	laporan	25

5	3	2	2.03	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	800	ASN	60	ASN	200	ASN	200	ASN	100	200	ASN	200	ASN	25
5	3	2	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase terlaksananya pemberian penghargaan bagi pegawai, pembinaan disiplin ASN dan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	%	100	%	100
5	3	2	2.04	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	600	ASN	596	ASN	167	ASN	159	PNS	95	150	ASN	150	ASN	25
5	3	2	2.04	7	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah Laporan Pembinaan Disiplin	4	Laporan	6	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	1	Laporan	24,75
5	3	2	2.04	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Penetapan Keputusan pembinaan kepegawaian dan kasus-kasus pelanggaran disiplin	48	laporan	60	laporan	12	laporan	12	laporan	100	12	laporan	12	laporan	25
5	4				<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>															
5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase indikator program prioritas sub koordinator diklat yang mencapai target	100	%	100	%	100	%	100	%	100	100	%	100	%	100



5	4	2	2.01		<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>	<b>Jumlah Laporan ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis</b>	4	laporan	5	laporan	1	laporan	1	laporan	100	1	laporan	1	laporan	24,75
5	4	2	2.01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	320	ASN	318	ASN	41	PNS	41	PNS	100	70	ASN	70	ASN	21,88
5	4	2	2.02		<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial, Fungsional dan Latsar CPNS</b>	861	ASN	956	ASN	217	ASN	217	ASN	100	261	ASN	261	ASN	30,31
5	4	2	2.02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	12	laporan	956	ASN	217	ASN	217	ASN	100	3	laporan	3	laporan	25

Dari tabel **Tabel 2.1.a. dan Tabel 2.1.b.** di atas terlihat bahwa realisasi program/kegiatan hampir semua target terpenuhi bahkan melampaui, hal ini didukung adanya komitmen bersama untuk senantiasa meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan di bidang kepegawaian agar tercapai pelayanan kepegawaian yang terus meningkat tiap tahun.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam menunjang pelaksanaan tugas
2. Belum optimalnya penerapan SOP dalam pelayanan Administrasi kepegawaian
3. Belum optimalnya Sarana dan Prasarana penunjang kinerja Aparatur khususnya untuk mengimplementasikan Pelayanan Satu Pintu

Dari identifikasi terhadap beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tersebut di atas, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak harus dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Setiap tahun, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang selalu berupaya maksimal untuk dapat meningkatkan kinerja pelayanan di bidang pengelolaan manajemen (administrasi) kepegawaian. Dalam beberapa tahun terakhir ini,

kualitas pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang secara bertahap mengalami peningkatan. Beberapa faktor pendukung adanya peningkatan kualitas pelayanan tersebut diantaranya :

1. Adanya jalinan kerjasama yang lebih intensif dengan institusi yang lain baik di bidang kepegawaian maupun non-kepegawaian.
2. Adanya peningkatan kualitas pelaksana tugas pokok dan fungsinya masing-masing
3. Adanya peningkatan fasilitas pendukung sarana/prasarana pengelolaan administrasi kepegawaian.
4. Adanya komitmen yang kuat secara bersama-sama untuk bergerak lebih dinamis dalam peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian.

Capaian kinerja organisasi diukur melalui evaluasi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Capaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang tahun 2021 dapat diketahui dari indikator-indikator pada **Tabel 2.2 (TC-30)** di bawah ini :

**Tabel 2.2 (TC-30)**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang**

NO	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra				Realisasi		Proyeksi		Catatan/ Analisis
				n-2	n-1	n	n+1	n-2	n-1	n	n+1	
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	
1	Nilai SAKIP BKD			67	68	69	70	76,61	78	97	98	Capaian tahun n-1 berdasarkan LHE AKIP Tahun 2022
2	Indek Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian			84,5	85	86	87	85,91	87	1	1,1	Prediksi Capaian Survey kepuasan Layanan Kepegawaian di Semester 1
3	Persentase ASN dengan nilai Kinerja Kriteria “baik” dan “sangat baik”			100				100				Terdapat perubahan uraian Indikator sasaran pada Renstra BKD tahun 2023-2026
	Persentase ASN dengan nilai Kinerja Kriteria “baik”				100	100	100		100	100	100	Prediksi capaian tahun n-1 100% optimis dicapai
4	Persentase ASN yang meningkat kemampuannya sesuai bidang tugas			60	65	70	80	62,5	65	70	80	Terdapat Indikator Sasaran baru pada Renstra BKD tahun 2023-2026

Selanjutnya gambaran keberhasilan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang dalam mencapai tujuan dan sasaran pada tahun 2022 tampak pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.2.a.**  
**Analisis Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2021**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target Perubahan</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Pencapaian Kinerja</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>
1	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Badan Kepegawaian Daerah	Nilai SAKIP BKD	67	76,61	114,34
2	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	Indek Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	84,00	85,91	102,27%
3	Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang berkualitas dan kompeten sesuai bidang tugasnya serta meningkatnya kedisiplinan ASN	Persentase ASN dengan nilai Kinerja Kriteria “baik” dan “sangat baik”	100	100	100%
	<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>				<b>105,53%</b>

Dari **Tabel 2.2** (T-C.30) di atas dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada indikator Nilai SAKIP BKD pada tahun 2022 (n-2), nilai capaiannya adalah 114,34% dikarenakan perolehan Nilai SAKIP tahun 2022 adalah 76,61 (BAIK) dari target yang ditetapkan sebesar 67.

Nilai SAKIP diperoleh dari Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan SAKIP oleh Inspektorat Daerah.

Keadaan ini menjadi gambaran pelaksanaan akuntabilitas kinerja di Badan Kepegawaian Daerah pada tahun 2022, dimana masih diperlukan ketepatan perencanaan, perbaikan manajemen kinerja dan pengukuran kinerja pada tahun berikutnya.

2. Indikator Indek Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian, nilai capaiannya adalah 102,27%, dimana berdasarkan hasil Survey Layanan Kepegawaian Tahun 2022 diperoleh nilai 85,91 dari target yang ditetapkan sebesar 84,00.

Capaian sebesar **102,27%** termasuk dalam kategori **Sangat Baik**, hal ini bisa menjadi tolak ukur bahwa pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian yang berjalan di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang sudah memenuhi target kinerja yang ditentukan.

Dan pencapaian ini menjadi semangat Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian ke depannya, demi memenuhi tantangan eksternal yang menuntut agar kualitas pelayanan administrasi kepegawaian semakin mengusung teknologi tepat guna yang dapat diaplikasikan untuk mempermudah proses pelayanan administrasi kepegawaian yang cepat, efisien, paperless dan tepat waktu.

Pengukuran Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian dilakukan dengan cara mengirimkan Link Survey ner ke OPD Pemkab Batang, yang kemudian dari isian kuisisioner tersebut dilakukan perhitungan dengan **formulasi** sebagai berikut :

***Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian =***

(Total Nilai Persepsi Responden per Parameter : Total Parameter yang terisi) x  
(1/jumlah Parameter) x Nilai Dasar 25

3. Indikator Persentase ASN dengan nilai Kinerja Kriteria “baik” dan “sangat baik”, nilai capaiannya adalah 100%, dimana realisasinya adalah 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%.

Pengukuran **Persentase ASN dengan nilai Kinerja Kriteria “baik” dan “sangat baik”** dilakukan dengan melakukan rekapitulasi Nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahun 2022 yang terkirim ke Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan, dengan **formulasi** sebagai berikut :

**Persentase ASN dengan nilai Kinerja Kriteria “baik” dan “sangat baik” =**

Jumlah ASN Kab Batang yang memiliki Kinerja "baik" dan "sangat baik" :  
Jumlah ASN Kab. Batang x 100

### **2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang**

Dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang memiliki peran penting ialah sumber daya aparturnya. Aparatur Sipil Negara yang memiliki kualitas dan komitmen dalam rangka tercapainya tujuan organisasi Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan merupakan salah satu fungsi penunjang urusan pemerintahan di daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Diperlukan Aparatur Sipil Negara sebagai unsur aparatur negara yang siap menjadi abdi masyarakat yang memberikan pelayanan secara adil dan merata

kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Analisis lingkungan baik intern maupun ekstern sangat penting bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah. Dengan mengetahui kondisi di dalam maupun di luar perangkat daerah akan dapat diketahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang diantaranya sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam menunjang pelaksanaan tugas
2. Belum optimalnya penerapan SOP dalam pelayanan Administrasi kepegawaian
3. Belum optimalnya Sarana dan Prasarana penunjang kinerja Aparatur.

Adapun berdasarkan analisis lingkungan eksternal, yaitu proses identifikasi terhadap lingkungan di luar organisasi yang menguraikan peluang dan tantangan yang ada meliputi aspek ekonomi, politik, sosial budaya dan sebagainya, maka peluang dan tantangan yang dihadapi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang, teridentifikasi sebagai berikut :

**Peluang (Opportunity) :**

1. Terbukanya komunikasi/koordinasi/konsultasi dengan institusi kepegawaian yang lain;
2. Terbukanya kesempatan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan SDM melalui Pengiriman Diklat Teknis maupun Fungsional;
3. Terbukanya kerjasama dengan pihak-pihak terkait di bidang aplikasi pengolahan data.



**Tantangan (Threat) :**

1. Tuntutan agar profesionalisme aparatur pelayanan lebih ditingkatkan;
2. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) telah membuka peluang bagi pemerintah untuk mengembangkan kebijakan dan manajemen ASN dengan basis sistem merit. Dengan kata lain, pendekatan tradisional yang menempatkan PNS sebagai alat kelengkapan birokrasi telah diubah dengan pendekatan moderen yang menempatkan PNS sebagai kunci penting dalam proses pembangunan nasional, hal ini menjadi tantangan terbesar bagi Badan Kepegawaian Daerah sebagai Perangkat Daerah yang bertugas melaksanakan Manajemen ASN di daerah.
3. Tuntutan agar kualitas pelayanan administrasi kepegawaian ditingkatkan melalui sistem pelayanan yang disesuaikan dengan teknologi tepat guna yang dapat diaplikasikan untuk mempermudah proses pelayanan administrasi kepegawaian.
4. Tuntutan agar proses-proses administrasi kepegawaian lebih cepat, efisien dan tepat waktu.

Dari uraian hambatan serta tantangan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang di atas, tentunya berpengaruh terhadap capaian kinerja tahunan dan capaian renstra sebagaimana diuraikan dalam sub bab 2.2 di atas di mana untuk capaian tahun 2022 termasuk dalam kategori **sangat baik**, namun mencermati hasil analisis masih terdapat kendala dalam pencapaian indikator program yang memerlukan upaya dan komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja agar perjanjian kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan lebih baik, selain itu harus dilaksanakan dengan komprehensif Sistem Pengendalian Intern agar tercapai efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan manajemen kepegawaian di Kabupaten Batang dalam jangka menengah, maka dapat dihasilkan rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan tahun 2024 antara lain :

**1. *Grand Design* Manajemen ASN**

*Grand design* ini akan berisi *roadmap* dari setiap batasan waktu yang ditentukan sehingga dapat menjadi acuan program dan kegiatan bagi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang yang selaras antar unitkerja.

**2. Penerapan Manajemen Berbasis Kinerja**

Penerapan manajemen berbasis kinerja diawali dengan penyusunan indikator-indikator aktivitas kerja yang terukur pada setiap posisi/jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang. Dalam pelaksanaannya, diperlukan sistem informasi manajemen berbasis kinerja yang terintegrasi dengan system *reward* and *punishment* yang jelas, sehingga akan terbentuk mekanisme kerja yang terukur dan sesuai dengan kontrak kinerja yang menjadi target pencapaian masing-masing SKPD.

**3. Internalisasi Budaya Organisasi**

Bukan hanya sekadar slogan, tetapi menjadi akar yang tertanam kuat dalam budaya kerja aparatur sipil negara (ASN). Hal inilah yang diharapkan dengan adanya satu *core values* (nilai-nilai dasar) ASN yang selaras bagi seluruh instansi pemerintah, yaitu BerAKHLAK.

BerAKHLAK menyarikan dan menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN yang ada dalam UU No. 5/2014 tentang ASN serta arahan

Presiden RI Joko Widodo yang sering menekankan pentingnya pelayanan kepada masyarakat. Nilai-nilai tersebut dikerucutkan menjadi tujuh nilai yang berlaku bagi ASN secara umum, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

Dengan adanya satu *core values* juga akan memudahkan proses adaptasi bagi ASN ketika melakukan mobilitas antar-instansi pemerintah. ASN tidak perlu menyesuaikan diri lagi dengan *core values* baru di instansi yang dituju karena sudah ada panduan perilaku yang berlaku secara umum untuk ASN di mana pun dia bertugas.

#### **4. Pengembangan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Kabupaten Batang**

Secara kualitas, pembangunan sumber daya manusia aparatur sejalan dengan reformasi birokrasi yang dilaksanakan untuk meningkatkan daya saing aparatur negara dalam mengimplementasikan program-program pemerintahan dan pembangunan nasional. Untuk menghasilkan sumber daya Aparatur Sipil Negara yang unggul, dinamis, dan sesuai dengan tuntutan kondisi pembangunan, maka diperlukan perubahan paradigma manajemen kepegawaian yang sebelumnya lebih menekankan kepada hak dan kewajiban individual pegawai ke arah perspektif baru yang lebih menekankan kepada manajemen pengembangan sumber daya manusia yang strategis (*strategic humanresource management*).

Pencapaian tujuan ini harus didukung oleh SDM aparatur yang profesional, berintegritas, jujur, berkinerja tinggi dan akuntabel, sehingga mampu merespon dengan cepat dan tepat terhadap perubahan lingkungan strategis yang berorientasi kepada masyarakat. Selain itu, Reformasi Birokrasi ditujukan untuk penyempurnaan sistem manajemen ASN yang dapat memacu

peningkatan profesionalisme, integritas, jujur, berkinerja tinggi, netral, akuntabel dan sejahtera serta yang dapat memacu produktivitas kerja aparatur. Pengembangan SDM Aparatur ini mencakup sistem pelatihan dan pengembangan yang diawali dengan Penyusunan Dokumen Analisa Kebutuhan Diklat dan Pengembangan Kompetensi ASN.

#### **5. Pengelolaan Database kepegawaian yang akurat dan up to date**

Informasi yang relevan, akurat, lengkap dan tepat dapat diperoleh dengan mengoptimalkan penggunaan sistem dan teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan (e-government) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Upaya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu :

- (1) pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik;
- (2) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara. Tersedianya sistem informasi Kepegawaian terpadu yang memungkinkan akses data dan informasi kepegawaian secara lengkap, akurat, dan terkini adalah bahan pengambilan keputusan untuk mendukung peningkatan pelayanan terhadap pegawai.

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sebagai perwujudan dari tindak lanjut beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategis, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program, kegiatan dan pendanaan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang, dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian tujuan dan sasaran strategis Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026. Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Penyusunan RKPD Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026 yang selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Batang Tahun 2023-2026. Tabel Review rancangan Rencana Kerja Badan Kepegawaian daerah Kabupaten Batang terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2023 dengan hasil analisis kebutuhan terdapat perubahan pada pagu Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN berdasarkan Hasil Rekon Gaji dan TPP dengan Bidang Perbendaharaan BPKPAD sehingga dapat kami sajikan data dalam **Tabel 2.4 (TC-31)** beriku

**Tabel 2.4 (TC-31)**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Badan**  
**Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang**

Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rancangan Awal RKPD				Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	target capaian kinerja	Pagu Indikatif		Lokasi	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	target capaian kinerja	Pagu Indikatif	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
KEPEGAWAIAN				7.389.668.854	KEPEGAWAIAN				7.033.038.548	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase capaian kinerja program BKD		5.118.578.507	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA		Persentase capaian kinerja program BKD		4.732.128.201	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun		15.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun		15.000.000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD yang tersusun	7 Laporan	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	BKD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD yang tersusun	7 Laporan	15.000.000	

<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>jumlah laporan keuangan yang disusun</b>		<b>3.664.060.457</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>jumlah laporan keuangan yang disusun</b>		<b>3.357.430.151</b>	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	3.640.600.457	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	BKD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	3.333.970.151	Hasil Rekon Gaji dan TPP dengan Bidang Perbendaharaan BPKPAD
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BKD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	23.460.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BKD	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	23.460.000	
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan pelaksanaan BinteK, Sosialisasi dan workshop</b>		<b>181.518.650</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah Laporan pelaksanaan BinteK, Sosialisasi dan workshop</b>		<b>114.718.650</b>	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BKD	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	33.435.400	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BKD	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	34.635.400	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BKD	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	120 Orang	148.083.250	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BKD	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	120 Orang	80.083.250	Sesuai Kebutuhan Pelaksanaan Bimbingan Teknis Tahun 2024
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah yg dilaksanakan</b>		<b>453.325.700</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah yg dilaksanakan</b>		<b>440.305.700</b>	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BKD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	9 paket	14.784.400	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	BKD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	9 paket	14.750.400	Penyesuaian terhadap standarisasi harga satuan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 paket	126.345.700	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKD	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 paket	114.054.500	Penganggaran pengadaan barang sesuai Usulan Kebutuhan Barang Tahun 2024
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BKD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	91.420.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	BKD	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 paket	91.420.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BKD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	50.156.300	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	BKD	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 paket	50.156.300	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	50 Dokumen	9.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	BKD	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	50 Dokumen	9.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	161.619.300	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	160.924.500	Penyesuaian terhadap standarisasi harga satuan dan kebutuhan anggaran perjalanan dinas
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>cakupan layanan operasional kantor</b>		<b>404.378.700</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>cakupan layanan operasional kantor</b>		<b>404.378.700</b>	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.113.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.113.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	213.600.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	213.600.000	



Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	50.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	50.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	138.665.700	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	BKD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	138.665.700	
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah</b>		<b>400.295.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah</b>		<b>400.295.000</b>	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BKD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	201.800.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	BKD	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	201.800.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BKD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	198.495.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	BKD	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	198.495.000	
<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>		<b>Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang selesai tepat waktu</b>		<b>2.271.090.347</b>	<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>		<b>Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang selesai tepat waktu</b>		<b>2.300.910.347</b>	
<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>		<b>Jumlah laporan terlaksananya pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>		<b>939.366.107</b>	<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>		<b>Jumlah laporan terlaksananya pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>		<b>969.366.107</b>	

Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	BKD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	26.862.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	BKD	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	26.862.000	
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BKD	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	656.859.117	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BKD	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	686.859.117	Kebutuhan Sewa Komputer dalam pelaksanaan Pemberkasan Pengajuan NIP PPPK
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKD	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	12 Dokumen	62.637.360	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKD	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	12 Dokumen	62.637.360	
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKD	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	119.007.790	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKD	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	119.007.790	
Pengelolaan Data Kepegawaian	BKD	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	12 Dokumen	73.999.840	Pengelolaan Data Kepegawaian	BKD	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	12 Dokumen	73.999.840	
<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>		<b>Jumlah laporan terprosesnya Mutasi, Kenaikan Pangkat dan Promosi ASN</b>		<b>732.691.000</b>	<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>		<b>Jumlah laporan terprosesnya Mutasi, Kenaikan Pangkat dan Promosi ASN</b>		<b>732.691.000</b>	
Pengelolaan Mutasi ASN	BKD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan mutasi Jabatan Pelaksana (JFU & JFT) antar Daerah	2 Dokumen	17.620.000	Pengelolaan Mutasi ASN	BKD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan mutasi Jabatan Pelaksana (JFU & JFT) antar Daerah	2 Dokumen	17.620.000	
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKD	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	20.000.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKD	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	20.000.000	

Pengelolaan Promosi ASN	BKD	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	695.071.000	Pengelolaan Promosi ASN	BKD	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	695.071.000	
<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>		<b>Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Pengembangan Kompetensi ASN dan Fasilitas Pengembangan Karier dalam Jabatan Fungsional</b>		<b>326.555.840</b>	<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>		<b>Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Pengembangan Kompetensi ASN dan Fasilitas Pengembangan Karier dalam Jabatan Fungsional</b>		<b>327.575.840</b>	
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BKD	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	12 Laporan	101.555.840	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BKD	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	12 Laporan	101.555.840	
Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	BKD	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	200 Orang	225.000.000	Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	BKD	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	200 Orang	226.020.000	Penyesuaian terhadap standarisasi harga satuan
<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>		<b>Persentase terlaksananya pemberian penghargaan bagi pegawai, pembinaan disiplin ASN dan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN</b>		<b>272.477.400</b>	<b>Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</b>		<b>Persentase terlaksananya pemberian penghargaan bagi pegawai, pembinaan disiplin ASN dan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN</b>		<b>271.277.400</b>	
Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	BKD	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	150 Orang	68.702.200	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	BKD	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	150 Orang	68.702.200	
Pembinaan Disiplin ASN	BKD	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	5703 Orang	113.565.200	Pembinaan Disiplin ASN	BKD	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	5703 Orang	112.365.200	

Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	BKD	Jumlah Laporan Penetapan Keputusan pembinaan kepegawaian dan kasus-kasus pelanggaran disiplin	12 Laporan	90.210.000	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	BKD	Jumlah Laporan Penetapan Keputusan pembinaan kepegawaian dan kasus-kasus pelanggaran disiplin	12 Laporan	90.210.000	
<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>				<b>925.356.750</b>	<b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>				<b>925.356.750</b>	
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>		<b>Persentase indikator program prioritas sub koordinator diklat yang mencapai target</b>		<b>925.356.750</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>		<b>Persentase indikator program prioritas sub koordinator diklat yang mencapai target</b>		<b>925.356.750</b>	
<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>		<b>Jumlah Laporan ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis</b>		<b>258.861.500</b>	<b>Pengembangan Kompetensi Teknis</b>		<b>Jumlah Laporan ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis</b>		<b>117.031.150</b>	
Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKD	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	70 Orang	258.861.500	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	BKD	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	70 Orang	117.031.150	Penyesuaian dalam rangka kebutuhan Orientasi PPPK
<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>		<b>Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial, Fungsional dan Latsar CPNS</b>		<b>666.495.250</b>	<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>		<b>Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial, Fungsional dan Latsar CPNS</b>		<b>808.325.600</b>	

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKD	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	666.495.250	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKD	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	808.325.600	Penyesuaian dalam rangka kebutuhan Orientasi PPPK
<b>TOTAL</b>				<b>8.315.025.604</b>					<b>7.958.395.298</b>	

Reviu terhadap rancangan awal RKPD dilakukan melalui identifikasi program atau kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan. Hasil reviu dapat dilihat pada tabel 2.4 dan dapat dianalisis sebagai berikut:

1. Terdapat perubahan pagu indikatif dibandingkan dengan Pagu APBD Tahun 2023 dari beberapa sub kegiatan sesuai evaluasi pelaksanaan sub kegiatan tahun sebelumnya dan penyesuaian terhadap Standarisasi Harga Satuan Tahun 2024 juga menyesuaikan hasil rekon Gaji dan TPP dengan Bidang perbendaharaan BPKPAD.
2. Pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK dihasilkan analisa kebutuhan sewa komputer dalam pelaksanaan pemberkasan NIP PPPK sehingga terdapat penambahan anggaran.
3. Pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan

Pemerintahan Umum dihasilkan analisa kebutuhan Biaya Kontribusi Orientasi PPPK sehingga terdapat penambahan anggaran yang bersumber dari anggaran sub kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.

## **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kabupaten, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan). Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain: 1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh; 2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang sebagai Perangkat Daerah (PD) yang melayani administrasi kepegawaian ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang selalu berupaya maksimal untuk mengusulkan program-program dan kegiatan yang mendukung peningkatan pelayanan manajemen kepegawaian. Usulan ini disampaikan melalui forum Perangkat Daerah (PD) pada proses perencanaan pembangunan daerah, yang difasilitasi oleh Bappeda Kabupaten Batang. Pada penyusunan RKPD 2024 ini, tidak terdapat Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat maupun dari Para Pemangku Kepentingan.

Tabel 2.5 (TC-32)

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 BKD  
Kabupaten Batang

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	-	-	-	-	-
		<b>NIHIL</b>			



## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Pencapaian visi dan misi RPJP Nasional 2025 dengan prioritas agenda pembangunan difokuskan pada pemantapan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan penekanan pada upaya :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
2. Perkembangan kemampuan ilmu dan teknologi; dan
3. Penguatan daya saing perekonomian.

Visi nasional pembangunan jangka panjang adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia dan masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan didorong oleh perekonomian yang makin maju, mandiri, dan merata di seluruh wilayah didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai serta makin kokohnya kesatuan dan persatuan bangsa yang dijiwai oleh karakter yang tangguh dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diselenggarakan dengan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta menjunjung tegaknya supremasi hukum.

Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mempunyai hubungan fungsional dan profesional baik langsung dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang ada di pusat, maupun dengan kantor-kantor regional Badan Kepegawaian Negara yang tersebar pada delapan wilayah kerja.

Pemerintah Pusat telah menetapkan beberapa kebijakan-kebijakan dalam rangka menata manajemen kepegawaian pada

pemerintahan daerah. Kebijakankebijakan tersebut bertujuan terwujudnya SMART ASN, yaitu ASN sebagai human capital yang profesional, handal, berintegritas, sejahtera dan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik sebagaimana diamanatkan pada Nawa Cita. Salah satu kebijakan yang telah dan sedang dilaksanakan adalah penyusunan roadmap Aparatur Sipil Negara pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Sesuai dengan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3621/M.PANRB/10/2016 tanggal 3 November 2016, pokok-pokok substansi dari Roadmap ASN 2017-2019 dan 2020-2024 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1.a.**  
**Pokok-Pokok Substansi Roadmap ASN**

No	Kegiatan	Rencana Aksi
1	Perencanaan kebutuhan, penataan jumlah, jabatan, dan distribusi ASN	<p>a. Perumusan kebutuhan ASN lebih tajam lagi dengan mengacu pada RPJMN ke-3, Nawacita, dan RPJMN ke-4, serta tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah (Pemda), sehingga rumusan kebutuhan ASN terhubung dengan kebutuhan organisasi dan kebutuhan strategis negara.</p> <p>b. Perumusan rencana kebutuhan ASN khususnya bagi pemerintahan daerah memperhatikan keunikan arah pengembangan daerah masing-masing, untuk menopang keunggulan nasional.</p> <p>c. Penuangan kebutuhan jabatan di atas didasarkan pada analisa jabatan, yaitu jabatan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.</p> <p>d. Penajaman perhitungan analisa beban kerja (ABK), didasarkan pada jumlah dan jenis jabatan yang tepat, sehingga tergambar kelebihan atau kekurangan pegawai berdasarkan jabatan yang</p>

		<p>dibutuhkan. Jenis jabatan yang dimaksud adalah jabatan fungsional, jabatan administrasi, dan jabatan p</p> <p>e. Penyusunan rencana distribusi ASN dalam peta jabatan yang tepat sesuai kebutuhan organisasi.</p> <p>f. Penyempurnaan dan/atau perbaikan perencanaan melalui e-formasi berdasarkan penajaman Rancangan Renja BKD Kabupaten Batang Tahun 2021 perencanaan kebutuhan dan analisis jabatan, dan peta jabatan.</p>
2	Audit atau assesment, perencanaan pengembangan karir, pola karir, promosi, dan mutasi ASN	<p>a. Perumusan dan pelaksanaan asesment kompetensi dan kinerja ASN</p> <p>b. Perumusan rencana pengembangan karir berdasarkan data pada e-Formasi.</p> <p>c. Perumusan rencana pengembangan kompetensi ASN didasarkan pada analisa kebutuhan diklat dengan menekankan linkage kebutuhan strategis organisasi.</p> <p>d. Perumusan sistem pengembangan kapasitas kepemimpinan pada seluruh level manajerial.</p> <p>e. Perumusan konsep dan rencana pola karir ASN untuk mendukung kebutuhan strategis organisasi.</p> <p>f. Perumusan konsep promosi menuju jabatan pimpinan tinggi</p> <p>g. Perumusan konsep peralihan beberapa jabatan Administrator (eselon III) dan pengawas (eselon IV) ke jabatan Fungsional.</p> <p>h. Penetapan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan organisasi.</p> <p>i. Perumusan kriteria Smart ASN pada masing-masing K/L dan pemda secara spesifik sesuai kebutuhan strategis organisasi.</p>

3	Penilaian kinerja, pengajian dan tunjangan, penghargaan, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perumusan manajemen kinerja berupa penetapan kinerja sesuai kebutuhan strategis organisasi, serta proses menurunkan (cascading) penetapan kinerja hingga ke seluruh ASN.</li> <li>b. Perumusan konsep pemberian tunjangan kinerja dan penghargaan dihubungkan dengan tingkat capaian kinerja.</li> <li>c. Perumusan konsep yang unik dalam memberikan jaminan pensiun dan jaminan hari tua.</li> </ul>
4	Disiplin dan integritas	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pendataan dan pemetaan kondisi dan tingkat disiplin dan integritas ASN pada organisasi masing-masing.</li> <li>b. Perumusan rencana peningkatan disiplin dan integritas ASN, sehingga semakin mendukung pencapaian tujuan organisasi.</li> <li>c. Kondisi penjatuhan hukuman disiplin yang tegas dan penegakan integritas ASN.</li> </ul>

Dari pokok-pokok roadmap ASN di atas terdapat beberapa kegiatan yang perlu untuk segera di tindaklanjuti, diantaranya penyusunan Analisis Jabatan, Analisis beban kerja, dan Evaluasi Jabatan baik jabatan struktural maupun jabatan pelaksana, Pelaksanaan assesment dan perencanaan pengembangan karir, pola karir, promosi, dan mutasi ASN, Penilaian Kinerja, Penyusunan regulasi tentang tunjangan kinerja, penghargaan kepada ASN, Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua, penegakan disiplin dan integritas ASN.

Selain hal tersebut di atas, dalam mendukung kebijakan pemerintah di bidang E-Government dan sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas-tugas di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia pemanfaatan sistem informasi berbasis aplikasi sangat dibutuhkan, sehingga akan tercipta efektifitas dan efisiensi dalam mengelola administrasi kepegawaian di Kabupaten Batang diantaranya SAPK, SIMPEG,

E-Formasi, dan E-Kinerja dalam rangka memberi pelayanan yang maksimal kepada para aparatur sipil negara.

Pelaksanaan pengelolaan manajemen kepegawaian di daerah harus selalu selaras mengikuti kebijakan nasional yang telah ditetapkan. Adapun beberapa peraturan dan kebijakan baru di bidang kepegawaian semakin memberikan tantangan bagi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah daerah melalui pengelolaan manajemen kepegawaian yang benar dan terarah.

Selain itu, Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 sebagai penjabaran dari Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 harus disinkronkan dan bersinergi dengan Renstra K/L atau Renstra Badan Kepegawaian yang berada di level atasnya, seperti Renstra Badan Kepegawaian Negara dan Renstra BKD Propinsi Jawa Tengah, Sebagaimana yang tercantum dalam Renstra BKN Tahun 2020-2024, BKN mempunyai visi yaitu Mewujudkan pengelola ASN yang profesional dan berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Hal tersebut sejalan dengan dan sinergi dengan Tujuan dalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026, yaitu

1. Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Badan Kepegawaian Daerah , dengan Indikator : Nilai SAKIP BKD
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Pemerintah, dengan Indikator : Nilai Sistem Merit

**Tabel 3.1.b**  
**Telaah Renstra K/L , Renstra Provinsi, Renstra/ Renja PD**

No	Renstra K/L, Renstra Provinsi, Renstra Kabupaten/Kota dan Renja PD	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1.	<p>Renstra K/L:</p> <p>Fokus sasaran yang akan dicapai oleh BKN adalah penerapan manajemen ASN yang transparan,</p>	<p>BKD mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah, mempunyai fungsi :</p> <p>a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;</p>	<p>Terkait dengan renstra K/L tidak ada permasalahan karena tujuan Renstra BKD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yaitu Terwujudnya penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen ASN telah selaras dengan sasaran Renstra K/L (BKN) dalam implementasi Sistem Merit.</p> <p>kemudian pada renstra Badan kepegawaian Daerah Kabupaten Batang juga telah sinkron , dimana tertuang dalam Tujuan</p>	<p>- Faktor Penghambat: Penerapan Sistem Merit pada Kabupaten/Kota:</p> <p>Belum diterapkannya secara Optimal penilaian sistem merit sebagai benchmark capaian awal nilai merit pada Kabupaten/Kota.</p>

	<p>kompetitif dan berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang professional dan bermartabat.</p>	<p>b. penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan publik di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;</p> <p>c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;</p> <p>d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintahan daerah bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;</p>	<p>perangkat daerah yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Pemerintah dengan Indikator Tujuan : Nilai Sistem Merit</p>	<p>- Faktor Pendorong :</p> <p>Telah diterbitkan Surat Edaran Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor</p> <p>B497/KASN/2/2019 tanggal</p>
--	--	---	--	--

			11 Februari 2019
	Renstra Provinsi :	e. pelaksanaan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian;	tentang Survei Pemetaan Penerapan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN dimana 35 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah akan menjadi lokus pemetaan tingkat penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di lingkungan pemerintah
2.	Fokus sasaran yang akan dicapai oleh BKD Provinsi Jawa Tengah yaitu terwujudnya penyelenggaraan Sistem Merit dalam manajemen ASN.	f. pelaksanaan pelayanan penunjang dalam bidang pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan sumber daya aparatur;	
		g. pelaksanaan teknis dan administratif di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;	
3.	Renstra /Renja BKD Kabupaten Batang : Fokus sasaran yang akan dicapai	h. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen kepegawaian;	



	<p>adalah Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Badan Kepegawaian Daerah, Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian, dan Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang berkualitas dan kompeten sesuai bidang tugasnya serta meningkatnya kedisiplinan ASN</p>	<p>i. pengelolaan dan pengembangan sistem manajemen informasi kepegawaian berbasis teknologi;</p> <p>j. pelaksanaan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah;</p>		
--	---	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> <li>k. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegawaian;</li> <li>l. penyelenggaraan kesekretarian BKD; dan</li> <li>m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ul>		
--	--	---	--	--

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah (PD) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang**

Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang sebagai unsur penunjang pemerintahan yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan mendukung ketercapaian Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 di bawah ini :

- Tujuan ke-2 : Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel,  
Sasaran : a. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah  
b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang cerdas, cepat dan responsif (agile governance)

Selaras dengan Tujuan ke-2 Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 di atas, maka Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang menetapkan **Tujuan Strategis Jangka Menengah** yaitu :

1. Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Badan Kepegawaian Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Pemerintah

Dalam rangka mencapai Tujuan Strategis Jangka Menengah di atas, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang telah menetapkan **3 (tiga) Sasaran Strategis** sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Badan Kepegawaian Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian serta meningkatnya kedisiplinan ASN
3. Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang berkualitas dan kompeten sesuai dengan bidang tugasnya

**Tabel 3.2.a.**  
**Tujuan dan Sasaran Strategis**  
**Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang**

No	Tujuan RPD Tahun 2023-2026	Sasaran RPD Tahun 2023-2026	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-			
						2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel	1. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1. Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Badan Kepegawaian Daerah		Indikator Tujuan Perangkat Daerah ke -1 : Nilai SAKIP BKD  <b>Formulasi :</b> Nilai SAKIP BKD Hasil Evaluasi Inspektorat Daerah	68 (Skor)	69 (Skor)	70 (Skor)	71 (Skor)
				Sasaran PD ke-1. Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Badan Kepegawaian Daerah	Nilai SAKIP BKD  <b>Formulasi :</b> Nilai SAKIP BKD Hasil Evaluasi Inspektorat Daerah	68 (Skor)	69 (Skor)	70 (Skor)	71 (Skor)
		2. Meningkatnya kualitas	2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan		Indikator Tujuan Perangkat Daerah ke-2 : Nilai Sistem Merit	175 (Skor)	200 (Skor)	225 (Skor)	250 (Skor)

		<p>pelayanan publik melalui pemerintahan yang cerdas, cepat dan responsif (agile governance)</p>	<p>Administrasi Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Pemerintah</p>		<p><b><u>Formulasi :</u></b></p> <p>(Jumlah Skor x Bobot dalam setiap aspek)</p>				
				<p>Sasaran PD ke-2. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian serta meningkatnya kedisiplinan ASN</p>	<p>Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian</p> <p><b><u>Formulasi :</u></b></p> <p>(Total Nilai Persepsi Responden Per Parameter : Total Parameter Yang Terisi ) x (1/jumlah parameter) x Nilai Dasar 25</p>	<p>85 (Skor)</p>	<p>86 (Skor)</p>	<p>87 (Skor)</p>	<p>89 (Skor)</p>
					<p>Persentase ASN dengan nilai kinerja kriteria "baik"</p> <p><b><u>Formulasi :</u></b></p> <p>(Jumlah ASN Kab Batang yang memiliki Kinerja "baik" : Jumlah ASN Kab. Batang ) x 100</p>	<p>100 (%)</p>	<p>100 (%)</p>	<p>100 (%)</p>	<p>100 (%)</p>

				<p>Sasaran PD ke- 3. Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang berkualitas dan kompeten sesuai bidang tugasnya serta meningkatnya kedisiplinan ASN</p>	<p>Persentase ASN yang meningkat kemampuannya sesuai bidang tugas</p> <p><b><u>Formulasi :</u></b> (Jumlah realisasi ASN yg dilatih : Jumlah Pendaftar Pelatihan) x 100</p>	<p>65 (%)</p>	<p>70 (%)</p>	<p>80 (%)</p>	<p>90 (%)</p>
--	--	--	--	---	---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Selanjutnya dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang merumuskan strategi dan arah kebijakan dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh.

Strategi merupakan suatu respon terhadap visi, misi dan tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan, program dan kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, strategi yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang juga harus disesuaikan dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Pemerintah Kabupaten Batang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.

Penetapan strategi dilakukan dengan tabulasi silang terhadap faktor-faktor internal dan eksternal untuk mendapatkan hal-hal sebagai berikut :

1. *Strenghts - Opportunities Strategy* (SO), yaitu menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal.
2. *Weakness - Opportunities Strategy* (WO), yaitu memperbaiki kelemahan internal dengan mengambil keuntungan dari peluang eksternal.
3. *Strenghts - Threats Strategy* (ST), yaitu menggunakan kekuatan internal untuk menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman eksternal.
4. *Weakness - Treaths Strategy* (WT), yaitu merupakan strategi pertahanan untuk menghindari kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal.

**Tabel 3.2.b**  
**Tujuan, Sasaran dan Strategi Kebijakan**  
**Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Badan Kepegawaian Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah ke -1 : <b>Nilai SAKIP BKD</b>	Sasaran PD ke-1. Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Badan Kepegawaian Daerah	<b>Nilai SAKIP BKD</b>	Peningkatan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja melalui penguatan kebijakan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP)
					Perbaikan mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan capaian kinerja.
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Pemerintah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah ke -2 : <b>Nilai Sistem Merit</b>	Sasaran PD ke-2. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian serta meningkatnya kedisiplinan ASN	<b>Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian</b>	Penerapan Sistem Pelayanan Kepegawaian berbasis Teknologi Informasi	Pemanfaatan Information and Communication Technologies (ICT) dalam pelayanan publik, dalam bentuk penguatan penerapan e-Services dan pemenuhan standar pelayanan publik
					Penerapan Pelayanan Kepegawaian Terpadu Satu Pintu



					Monitoring dan evaluasi terkait Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kepegawaian
					Penerapan Sistem Merit dan Manajemen Talenta
					<p>Penerapan disiplin, penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) dalam birokrasi.</p> <p>Mengembangkan sistem manajemen kinerjaASN</p> <p>Penetapan indikator aktivitas kerja terukur sesuai dengan level jabatan(cascading kinerja)</p> <p>Sistem reward dan punishment yang terintegrasi melalui e-kinerja</p>
		Sasaran PD ke- 3. Terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang berkualitas dan kompeten sesuai bidang tugasnya serta meningkatnya kedisiplinan ASN	<b>Persentase ASN yang meningkat kemampuannya sesuai bidang tugas</b>	Peningkatan kualitas ASN yang berintegritas dan berkompetensi tinggi sesuai dengan bidang tugasnya	Penyusunan kebijakan dan pengiriman ASN mengikuti pengembangan kompetensi manajerial, kompetensi teknis dan kompetensi sosial kultural

### **3.3 Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024**

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategis, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program, kegiatan dan pendanaan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang, dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian tujuan dan sasaran strategis Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026. Kegiatan dan Sub Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah.

Adapun Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang pada Tahun 2024 merupakan perincian dari Program dan Kegiatan sebagaimana telah tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026, sebagaimana Lampiran Tabel 3.3 (T-C.33) berikut ini :

**Tabel 3.3 (T-C.33)**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan**  
**Prakiraan Maju Tahun 2025**  
**Provinsi/Kabupaten/Kota : Jawa Tengah / Batang Nama**  
**Perangkat Daerah : Badan Kepegawaian Daerah**

Kode						Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun ke-n (Tahun 2024)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	03					KEPEGAWAIAN				7.033.038.548				7.437.857.216
5	03	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase capaian kinerja program BKD			4.732.128.201				5.131.378.756
5	03	01	2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun			15.000.000				15.000.000
5	03	01	2.01	0006		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD yang tersusun	BKD	7 Laporan	15.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		7 Laporan	15.000.000
5	03	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan keuangan yang disusun			3.357.430.151				3.676.860.706

5	03	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	BKD	34 Orang/bulan	3.333.970.151	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		34 Orang/bulan	3.653.400.706
5	03	01	2.02	0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	BKD	12 Dokumen	23.460.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	23.460.000
5	03	01	2.05			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan pelaksanaan Bintek,Sosialisasi dan workshop</b>			<b>114.718.650</b>				<b>181.518.650</b>
5	03	01	2.05	0010		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	BKD	60 Orang	34.635.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		60 Orang	33.435.400
5	03	01	2.05	0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	BKD	120 Orang	80.083.250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		120 Orang	148.083.250
5	03	01	2.06			<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah yg dilaksanakan</b>			<b>440.305.700</b>				<b>453.325.700</b>
5	03	01	2.06	0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	BKD	9 Paket	14.750.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		9 paket	14.784.400
5	03	01	2.06	0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	BKD	10 Paket	114.054.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 paket	126.345.700

5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	BKD	5 Paket	91.420.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 paket	91.420.000
5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	BKD	5 Paket	50.156.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5 paket	50.156.300
5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	BKD	50 Dokumen	9.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		50 Dokumen	9.000.000
5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	BKD	12 Laporan	160.924.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 laporan	161.619.300
5	03	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>cakupan layanan operasional kantor</b>			<b>404.378.700</b>				<b>404.378.700</b>
5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	BKD	12 Laporan	2.113.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	2.113.000
5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	BKD	12 Laporan	213.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	213.600.000
5	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	BKD	12 Laporan	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	50.000.000
5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	BKD	12 Laporan	138.665.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	138.665.700

5	03	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah</b>			<b>400.295.000</b>				<b>400.295.000</b>
5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	BKD	24 Unit	201.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		24 Unit	201.800.000
5	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	BKD	1 Unit	198.495.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Unit	198.495.000
5	03	02			<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang selesai tepat waktu</b>			<b>2.300.910.347</b>				<b>2.306.478.460</b>
5	03	02	2.01		<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>Jumlah laporan terlaksananya pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>			<b>969.366.107</b>				<b>964.754.220</b>
5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	BKD	1 Dokumen	26.862.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	26.862.000
5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	BKD	1 Dokumen	686.859.117	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	682.247.230
5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	BKD	12 Dokumen	62.637.360	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	62.637.360

5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	BKD	12 Dokumen	119.007.790	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	119.007.790
5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	BKD	12 Dokumen	73.999.840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Dokumen	73.999.840
5	03	02	2.02		<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>Jumlah laporan terprosesnya Mutasi, Kenaikan Pangkat dan Promosi ASN</b>			<b>732.691.000</b>				<b>732.691.000</b>
5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan mutasi Jabatan Pelaksana (JFU & JFT) antar Daerah	BKD	2 Dokumen	17.620.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	17.620.000
5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	BKD	2 Dokumen	20.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 Dokumen	20.000.000
5	03	02	2.02	0004	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	BKD	1 Dokumen	695.071.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 Dokumen	695.071.000
5	03	02	2.03		<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Pengembangan Kompetensi ASN dan Fasilitasi Pengembangan Karier dalam Jabatan Fungsional</b>			<b>327.575.840</b>				<b>336.555.840</b>
5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BKD	12 Laporan	101.555.840	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	111.555.840

5	03	02	2.03	0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	BKD	200 Orang	226.020.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		200 Orang	225.000.000
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase terlaksananya pemberian penghargaan bagi pegawai, pembinaan disiplin ASN dan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN			271.277.400				272.477.400
5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	BKD	150 Orang	68.702.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		150 Orang	68.702.200
5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	BKD	5703 Orang	112.365.200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		5703 Orang	113.565.200
5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Penetapan Keputusan pembinaan kepegawaian dan kasus-kasus pelanggaran disiplin	BKD	12 Laporan	90.210.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 Laporan	90.210.000
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				925.356.750				925.356.750
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase indikator program prioritas sub koordinator diklat yang mencapai target			925.356.750				925.356.750
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Laporan ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis			117.031.150				258.861.500



5	04	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	BKD	70 Orang	117.031.150	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	70 Orang	258.861.500
5	04	02	2.02		<b>Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional</b>	<b>Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial, Fungsional dan Latsar CPNS</b>			<b>808.325.600</b>			<b>666.495.250</b>
5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	BKD	1 Laporan	808.325.600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 Laporan	666.495.250
<b>TOTAL</b>									<b>7.958.395.298</b>			<b>8.363.213.966</b>

Dari tabel 3.3 (T-C.33) di atas dapat diuraikan hal-hal sebagai berikut :

1. Rumusan nomenklatur dan jenis program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024 sesuai dengan rancangan awal RKPD;
2. Terdapat perubahan pagu indikatif dibandingkan dengan Pagu APBD Tahun 2023 dari beberapa sub kegiatan, hal ini menyesuaikan dengan evaluasi pelaksanaan sub kegiatan tahun sebelumnya dan perhitungan ulang perencanaan, sehingga diharapkan lebih efektif dan efisien sesuai kebutuhan pencapaian target kinerja.

#### **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 telah disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang, Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026. Rencana Kerja dan Pendanaan tersebut juga memperhatikan sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Pada tahun 2024, jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang adalah sebesar Rp. **7.958.395.298,-** yang tersusun dalam 3 Program, 12 Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

**Tabel 4.1**  
**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**  
**Kabupaten Batang**  
**Tahun 2024**

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian kinerja dan Rencana Pendanaan					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
							Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Nasional		Prioritas	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
													Daerah		
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			7.958.395.298							8.363.213.966
5	03				KEPEGAWAIAN			7.033.038.548							7.437.857.216
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Persentase capaian kinerja program BKD	100%	4.732.128.201	BKD					100%	5.131.378.756
5	03	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	7 Laporan	15.000.000	BKD					7 Laporan	15.000.000
5	03	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja OPD yang tersusun	7 Laporan	15.000.000	BKD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4) Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yangbaik, bersih dan akuntabel		7 Laporan	15.000.000
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	jumlah laporan keuangan yang disusun	12 Dokumen	3.357.430.151						12 Dokumen	3.676.860.706
5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji danTunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/bulan	3.333.970.151	BKD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4) Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yangbaik, bersih dan akuntabel		34 Orang/bulan	3.653.400.706

5	03	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	23.460.000	BKD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4) Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel		12 Dokumen	23.460.000
5	03	01	2.05		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan pelaksanaan Bintek, Sosialisasi dan workshop</b>	3 Laporan	<b>114.718.650</b>						3 Laporan	<b>181.518.650</b>
5	03	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	34.635.400	BKD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4) Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel		60 Orang	33.435.400
5	03	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	120 Orang	80.083.250	BKD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4) Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel		120 Orang	148.083.250
5	03	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>jumlah laporan pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah yg dilaksanakan</b>	12 Laporan	<b>440.305.700</b>						12 Laporan	<b>453.325.700</b>
5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	9 Paket	14.750.400	BKD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4) Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel		9 paket	14.784.400
5	03	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	114.054.500	BKD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4) Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel		10 paket	126.345.700
5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	91.420.000	BKD	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		4) Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel		5 paket	91.420.000

5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	50.156.300	BKD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel		5 paket	50.156.300
5	03	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50 Dokumen	9.000.000	BKD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel		50 Dokumen	9.000.000
5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	160.924.500	BKD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel		12 laporan	161.619.300
5	03	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>cakupan layanan operasional kantor</b>	12 Bulan	<b>404.378.700</b>						12 Bulan	<b>404.378.700</b>
5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.113.000	BKD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel		12 Laporan	2.113.000
5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	213.600.000	BKD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel		12 Laporan	213.600.000
5	03	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	50.000.000	BKD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel		12 Laporan	50.000.000
5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	138.665.700	BKD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel		12 Laporan	138.665.700

5	03	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah</b>	12 Bulan	<b>400.295.000</b>						12 Bulan	<b>400.295.000</b>
5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	201.800.000	BKD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel		24 Unit	201.800.000
5	03	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	198.495.000	BKD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel		1 Unit	198.495.000
5	03	02			<b>PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>	<b>Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang selesai tepat waktu</b>	100%	<b>2.300.910.347</b>						100%	<b>2.306.478.460</b>
5	03	02	2.01		<b>Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	<b>Jumlah laporan terlaksananya pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN</b>	12 Laporan	<b>969.366.107</b>						12 Laporan	<b>964.754.220</b>
5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	26.862.000	BKD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel		1 Dokumen	26.862.000
5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen	686.859.117	BKD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel		1 Dokumen	682.247.230
5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	12 Dokumen	62.637.360	BKD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel		12 Dokumen	62.637.360

5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen	119.007.790	BKD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel		12 Dokumen	119.007.790
5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	12 Dokumen	73.999.840	BKD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel		12 Dokumen	73.999.840
5	03	02	2.02		<b>Mutasi dan Promosi ASN</b>	<b>Jumlah laporan terprosesnya Mutasi, Kenaikan Pangkat dan Promosi ASN</b>	12 Laporan	<b>732.691.000</b>						12 Laporan	<b>732.691.000</b>
5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan mutasi Jabatan Pelaksana (JFU & JFT) antar Daerah	2 Dokumen	17.620.000	BKD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel		2 Dokumen	17.620.000
5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2 Dokumen	20.000.000	BKD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel		2 Dokumen	20.000.000
5	03	02	2.02	0004	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	1 Dokumen	695.071.000	BKD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel		1 Dokumen	695.071.000
5	03	02	2.03		<b>Pengembangan Kompetensi ASN</b>	<b>Jumlah Laporan hasil Pengelolaan Pengembangan Kompetensi ASN dan Fasilitasi Pengembangan Karier dalam Jabatan Fungsional</b>	12 Laporan	<b>327.575.840</b>						12 Laporan	<b>336.555.840</b>
5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	12 Laporan	101.555.840	BKD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel		12 Laporan	111.555.840



5	03	02	2.03	0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	200 Orang	226.020.000	BKD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel		200 Orang	225.000.000
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase terlaksananya pemberian penghargaan bagi pegawai, pembinaan disiplin ASN dan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	100%	271.277.400						100%	272.477.400
5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	150 Orang	68.702.200	BKD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel		150 Orang	68.702.200
5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah Laporan Pembinaan Disiplin	5703 Orang	112.365.200	BKD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel		1 Laporan	113.565.200
5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Penetapan Keputusan pembinaan kepegawaian dan kasus-kasus pelanggaran disiplin	12 Laporan	90.210.000	BKD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel		12 Laporan	90.210.000
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			925.356.750							925.356.750
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase indikator program prioritas sub koordinator diklat yang mencapai target	100%	925.356.750						100%	925.356.750
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Laporan ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis	1 Laporan	117.031.150						1 Laporan	258.861.500

5	04	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	70 Orang	117.031.150	BKD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel	70 Orang	258.861.500
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Jumlah ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi Manajerial, Fungsional dan Latsar CPNS	200 orang	808.325.600					200 orang	666.495.250
5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1 Laporan	808.325.600	BKD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4) Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel	1 Laporan	666.495.250
TOTAL								7.958.395.298						8.363.213.966

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis ( Renstra ) Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2023-2026 dan selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 khususnya dalam rangka mendukung terwujudnya salah satu **Tujuan Pemerintah Kabupaten Batang yaitu “Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel”** dengan **Sasaran “Meningkatnya efektivitas dan efisiensi kinerja dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah”** dan **“Meningkatnya kualitas pelayanan publik melalui pemerintahan yang cerdas, cepat dan responsif (agile governance)”**.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang tahun 2024 ini sudah melalui tahapan-tahapan yang dipersyaratkan, dan pendekatan partisipatif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan internal, sehingga keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 ini menjadi tanggung jawab bersama pegawai dan para pemangku kepentingan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 dan selanjutnya Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA PD) akan menjadi acuan dalam menentukan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), dan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024.

Berdasarkan analisa program dan kebutuhan anggaran, Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang tahun 2024 membutuhkan anggaran sebesar Rp. **7.958.395.298,-** yang terinci dalam 3 Program, 12 kegiatan dan 32 sub kegiatan. Harapannya, Rencana Kerja (Renja) ini dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Tahun 2023-2026 dan selaras dengan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Batang tahun 2023-2026 dan sejalan dengan arah implementasi program unggulan Gubernur Jawa Tengah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi Berbasis Kompetensi dan memperkuat sistem pelayanan publik secara cepat, murah, transparan, dan terintegrasi.

Demikian semoga Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 ini nantinya dapat memberikan gambaran dan kontribusi terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Batang Tahun 2024.

Batang, 31 Juli 2023  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
KABUPATEN BATANG



SUPARDI, SH, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19630706 198503 1 015